BAGIAN ANGGARAN 018

LAPORAN KEUANGAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI
KEMENTERIAN PERTANIAN

PERIODE SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2011

Jl. Jambi – Palembang Km. 16 Desa Pondok Meja
Kotak Pos 225 Jambi 36001

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi adalah entitas akuntansi dari Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 55.524.860,- (*lima puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) atau 70,38 persen dari yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2011. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp. 13.703.507.379,- (*tiga belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) atau 95,48 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA 2011;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2011. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 9.023.169.840,- (*sembilan milyar dua puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) dan Kewajiban sebesar Rp. 0,- (*nihil*) sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 9.023.169.840,- (*sembilan milyar dua puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*);

3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Tahun Anggaran 2011 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance).* Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jambi, 24 Januari 2012
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Ir. Teddy Rachmat Muliady, MM
NIP. 19600511 198603 1 001

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2010 23
Grafik 2. Komposisi Realisasi Penerimaan PNBP Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2010 24
Grafik 3. Komposisi Alokasi Belanja Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2010 25
Grafik 4. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2011 26
Grafik 5. Komposisi Neraca Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010 31
Grafik 6. Posisi Aset Tetap Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010 33

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Lampiran	vi
Daftar Singkatan	vii
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran	4
III. Neraca	5
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	
A.1. Dasar Hukum	6
A.2. Kebijakan Teknis Satuan Kerja	6
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	13
A.4. Kebijakan Akuntansi	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	22
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
B.3. CatatanPenting Lainnya	28
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
C.1. Posisi Keuangan Secara Umum	30
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	31
C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya	38
D. Pengungkapan Penting Lainnya	
D.1. Rekening Pemerintah	38
D.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	38
D.3. Pengungkapan Lain-lain	38

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 65/PB/2010

- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- Neraca Percobaan

Laporan Barang Pengguna

- Laporan Barang Pengguna

Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010 24
Tabel 2. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010 27
Tabel 3. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010 27
Tabel 4. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010 28
Tabel 5. Komposisi Neraca Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010 30
Tabel 6. Posisi Aset Tetap Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010 33
Tabel 7. Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010 34
Tabel 8. Posisi Perbandingan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010 35
Tabel 9. Posisi Perbandingan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010 35
Tabel 10. Posisi Perbandingan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010 36
Tabel 11. Posisi Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010 36
Tabel 12. Posisi Perbandingan Cadangan Persediaan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010 37
Tabel 13. Posisi Perbandingan Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010 37
Tabel 14. Posisi Perbandingan Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010 38

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Halaman

Pendapatan Negara dan Hibah

Catatan	B.2.1	**Pendapatan Negara dan Hibah**	22
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	23
Catatan	B.2.1.1.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	24

Belanja Negara

Catatan	B.2.2	**Belanja Negara**	25
Catatan	B.2.2.1	Belanja	25
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pemerintah Pegawai	26
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Pemerintah Barang	27
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Pemerintah Modal	28

NERACA

ASET

	C.2.1.1	**Aset Lancar**	
Catatan	C.2.1.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	31
Catatan	C.2.1.1.2	Persediaan	31
	C.2.1.2	**Aset Tetap**	
Catatan	C.2.1.2.1	Peralatan dan Mesin	33
Catatan	C.2.1.2.2	Gedung dan Bangunan	35
Catatan	C.2.1.2.3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	35
Catatan	C.2.1.2.4	Aset Tetap Lainnya	36

KEWAJIBAN

	C.2.2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**	
Catatan	C.2.2.1.1	Utang Kepada Pihak Ketiga	36

EKUITAS

	C.2.3.1	**Ekuitas Dana Lancar**	
Catatan	C.2.3.1.1	Cadangan Persediaan	37
Catatan	C.2.3.1.2	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang	37
	C.2.3.2	**Ekuitas Dana Investasi**	
Catatan	C.2.3.2.1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	38

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

Laporan Keuangan Balai Pelatihan Pertanian Jambi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, 24 Januari 2012
Kepala BPP Jambi

Dr. Ir. Teddy Rachmat Muliady, MM
NIP. 19600511 198603 1 001

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun 2011 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan negara dan hibah, belanja dan pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2011. Laporan realisasi anggaran balai pelatihan pertanian jambi hanya mencakup unsur pendapatan negara dan hibah serta belanja.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada periode tahun anggaran 2011 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 55.524.860,- (*lima puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) atau mencapai 70,38 persen dari anggaran.

Realisasi Belanja Negara pada periode tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 13.703.507.379,- (*tiga belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) atau mencapai 95,48 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 13.672.457.379,- (*tiga belas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) atau 95,47 persen dari anggarannya dan Belanja PNBP sebesar Rp. 31.050.000,- (*tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah*) atau 100 persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2011 dan 2010 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	TA 2011		TA 2010	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	**78.898.000,-**	**55.524.860,-**	**50.128.000,-**	**50.177.800,-**
- Penerimaan Negara Bukan Pajak	78.898.000,-	55.524.860,-	50.128.000,-	50.177.800,-
Belanja Rupiah Murni	**14.352.514.000,-**	**13.703.507.379,-**	**14.167.237.000,-**	**11.973.107.150,-**
- Belanja Pegawai	3.443.440.000,-	3.493.160.929,-	3.184.074.000,-	3.181.358.165,-
- Belanja Barang	8.230.101.000,-	7.777.951.950,-	10.883.163.000,-	8.674.015.425,-
- Belanja Modal	2.678.973.000,-	2.432.394.500,-	100.000.000,-	98.875.000,-

2. NERACA

Neraca balai pelatihan pertanian jambi periode tahun anggaran 2011 menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana dan dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran yang lalu.

Jumlah Aset balai pelatihan pertanian jambi periode tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 9.023.169.840,- (*sembilan milyar dua puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 82.335.150,- (*delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*) dan Aset Tetap sebesar Rp. 8.940.834.690,- (*delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*).

Jumlah Kewajiban balai pelatihan pertanian jambi periode tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 0,- (*nihil*) yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana balai pelatihan pertanian jambi periode tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 9.013.252.774,- (*sembilan milyar tiga belas juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*) yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 72.418.084,- (*tujuh puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu delapan puluh empat rupiah*) dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 8.940.834.690,- (*delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*).

Ringkasan Neraca periode tahun anggaran 2011 dan periode tahun anggaran 2010 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	Tahun Anggaran 2011	Tahun Anggaran 2010	Nilai kenaikan/ (penurunan)
Aset			
Aset Lancar	82.335.150,-	33.324.000,-	49.011.150,-
Aset Tetap	8.940.834.690,-	6.508.440.190,-	2.432.394.500,-
Aset Lainnya	0,-	0,-	0,-
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	9.917.066,-	19.019.000,-	(9.101.934,-)
Ekuitas Dana			
Ekuitas Dana Lancar	72.418.084,-	14.305.000,-	58.113.084,-
Ekuitas Dana Investasi	8.940.834.690,-	6.508.440.190,-	2.432.394.500,-

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

I. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/ tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

RENCANA STRATEGIS BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

A. Visi Dan Misi Balai Pelatihan Pertanian Jambi

Sejalan dengan visi pembangunan pertanian dan arah pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis, maka ditetapkan **Visi** Balai Pelatihan Pertanian Jambi, sebagai berikut ***"Menjadi Lembaga Pelatihan Pertanian yang handal dalam menghasilkan SDM Pertanian yang berkemauan dan berkemampuan tinggi dalam bekerja dan beragribisnis".***

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan serangkaian **Misi** sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas program berbasis kinerja.
2. Meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas agribisnis.
3. Melaksanakan pengembangan teknik pelatihan perkebunan dan teknologi lahan rawa dan melaksanakan pelatihan teknik fungsional dan kewirausahaan bagi aparatur dan non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK).

4. Meningkatkan kompetensi tenaga kepelatihan dalam memberikan pelayanan konsultasi agribisnis yang prima.
5. Meningkatkan kerjasama pelatihan dalam negeri dan melaksanakanpelatihan kerjasama luar negeri.
6. Melaksanakan sistem informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan melakukan pengendalian internal yang akurat dan kredibel.
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi penatausahaan dan rumah tangga balai yang transparan dan akuntabel.

B. Tujuan Dan Sasaran Pengembangan SDM Pertanian

Sejalan dengan visi dan misi BPP Jambi, maka dirumuskan tujuan selama periode 5 (lima) tahun ke depan untuk memberikan arahan terhadap Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pelatihan pertanian. Adapun tujuan BPP Jambi dalam kurun waktu 2010-2014 adalah meliputi (1) Menyusun rancang bangun dan program pelatihan pertanian sesuai kebutuhan. (2). Meningkatkan status dan kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian berdasarkan standar nasional dan internasional. (3) Meningkatkan kapasitas tenaga fungsional pelatihan dan tenaga kediklatan berdasarkan standar profesi. (4) Menerapkan dan mengembangkan sistem, prosedur, dan penatausahaan penyelenggaraan pelatihan pertanian sesuai standar nasional dan internasional, yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan program berbasis kinerja
2. Mengoptimalkan penggunaan/pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan pelatihan serta produktivitas instalasi agribisnis dalam mendukung 4 (empat) sukses Pembangunan Pertanian.
3. Meningkatkan system manajemen mutu penyelenggaraan pelatihan sesuai system mutu yang berkualitas (ISO – 9001:2008).
4. Menyiapkan sarana prasarana dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pertanian menjadi Lembaga Diklat Profesi (LDP) dan Tempat Uji Kompetensi.
5. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan teknis agribisnis dengan menghasilkan standar-standar melalui penyusunan sandar kompetensi kerja (SKKNI).
6. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelatihan teknis agribisnis dan kewirausahaan dalam rangka mendukung 4 (empat) sukses Pembangunan Pertanian.
7. Menghasilkan aparatur dan non aparatur pertanian yang profesional dalam mendukung 4 (empat) sukses Pembangunan Pertanian.

8. Meningkatkan kompetensi tenaga kepelatihan pejabat fungsional widyaiswara sesuai keahlian untuk mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian.
9. Mengembangkan metodologi dan alat bantu multimedia berlatih pelatihan sesuai dengan standar kompetensi kerja.
10. Meningkatkan tenaga kepelatihan yang profesional bagi pejabat struktural dan fungsional umum.
11. Meningkatkan citra untuk memperkuat eksistensi dan jejaring kerja balai sebagai lembaga yang terpercaya.
12. Menyediakan data dan informasi untuk pemantauan evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengendalian internal.
13. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi, penatausahaan dan rumah tangga balai sesuai peraturan yang berlaku

Berdasarkan visi, misi dan tujuan BPP Jambi pada kurun waktu 2010-2014, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai secara kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut :

1. Tersusunnya 1 paket rancang bangun dan program pelatihan pertanian untuk pelatihan pertanian.
2. Meningkatnya eselonering Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi menjadi Balai Besar.
3. Terakreditasinya 18 lembaga pelatihan swadaya.
4. Meningkatnya kapasitas 53 orang tenaga fungsional pelatihan dan 60 orang tenaga kediklatan berdasarkan standar profesi
5. Tersusunnya 1 paket SOP Pelatihan untuk pelatihan pertanian.
6. Terlaksananya pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian internal penyelenggaraan pelatihan pertanian pada wilayah kerja Balai dan 18 lembaga pelatihan swadaya
7. Terlaksananya administrasi dan manajemen pelatihan yang transparan dan akuntabel pada Balai Pelatihan Pertanian Jambi.
8. Terlatihnya 120 aparatur pertanian (PL I) melalui pelatihan teknis Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) pada Padi.
9. Terlatihnya 120 aparatur pertanian (PL I) melalui pelatihan teknis Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) pada Jagung.
10. Terlatihnya 120 aparatur pertanian (PL I) melalui pelatihan teknis Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) pada Kedele.
11. Terlatihnya 320 aparatur pertanian (PL II) melalui pelatihan teknis Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) pada Padi.

12. Terlatihnya 320 aparatur pertanian (PL II) melalui pelatihan teknis Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) pada Jagung.
13. Terlatihnya 320 aparatur pertanian (PL II) melalui pelatihan teknis Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) pada Kedele.
14. Terlatihnya 210 aparatur pertanian melalui pelatihan TOT diversifikasi pangan.
15. Terlatihnya 210 aparatur pertanian melalui pelatihan diversifikasi pangan.
16. Terlatihnya 60 aparatur pertanian melalui pelatihan Peningkatan Nilai tambah Komoditas Kelapa Sawit
17. Terlatihnya 60 aparatur pertanian melalui pelatihan Peningkatan Nilai tambah Komoditas Karet
18. Terlatihnya 60 aparatur pertanian melalui pelatihan Peningkatan Nilai tambah Komoditas Kakao
19. Terlatihnya 60 aparatur pertanian melalui pelatihan Peningkatan Nilai tambah Komoditas Kopi
20. Terlatihnya 120 aparatur pertanian melalui pelatihan Teknis Agribisnis Buah Naga;
21. Terlatihnya 120 aparatur pertanian melalui pelatihan Teknis Agribisnis Durian
22. Terlatihnya 120 aparatur pertanian melalui pelatihan Teknis Agribisnis Jamur
23. Terlatihnya 5500 aparatur dalam Pelatihan pengembangan PUAP (TOT dan Penyuluh Pendamping)
24. Terlatihnya 550 pendamping dalam pengembangan LM3
25. Terlatihnya 60 aparatur dalam Pelatihan Fungsional RIHP/ Rumpun Ilmu Hayati Pangan (Penyuluh Pertanian, Pengawas Benih Tanaman,POPT, dll)
26. Terlatihnya 60 aparatur dalam Pelatihan Dasar dan Pelatihan Penjenjangan bagi penyuluh pertanian (dasar, terampil dan ahli)
27. Terlatihnya 267 Non aparatur pertanian melalui pelatihan manajemen dan kepemimpinan bagi pengelola/pengurus P4S;
28. Terlatihnya 270 Non aparatur pertanian melalui pelatihan manajemen dan kepemimpinan bagi petani/gapoktan;
29. Terlatihnya 270 Non aparatur pertanian melalui pelatihan metodologi pelatihan/permagangan bagi pengelola P4S;
30. Terlatihnya 300 Non aparatur pertanian melalui pelatihan teknis agribisnis komoditas Perkebunan
31. Terlatihnya 768 Non aparatur pertanian melalui pelatihan teknis agribisnis komoditas tanaman pangan;
32. Terlatihnya 309 Non aparatur pertanian melalui pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
33. Terlatihnya 252 Non aparatur pertanian melalui pelatihan diversifikasi pangan;

34. Terlatihnya 120 Non aparatur pertanian melalui pelatihan kewirausahaan bagi petani muda;
35. Terlatihnya 330 Non aparatur pertanian melalui pelatihan kewirausahaan bagi petani muda;
36. Terlatihnya 300 Non aparatur pertanian melalui pelatihan ATC;
37. Terlatihnya 250 Non aparatur pertanian melalui pelatihan PMT;
38. Terlatihnya 5.000 Non aparatur pertanian melalui pelatihan PUAP bagi pengurus gapoktan;
39. Terlatihnya 480 Non aparatur pertanian melalui pelatihan LM3 bagi pengelola LM3;
40. Terlaksananya bimbingan lanjutan dan evaluasi pasca pelatihan.
41. Terselenggaranya pelatihan pertanian dalam kerangka kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negri;
42. Tersedianya data dan informasi dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian internal;

C. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan Balai Pelatihan Pertanian Jambi terdiri dari:

1. Pelatihan teknis dan kewirausahaan agribisnis diarahkan untuk mewujudkan swasembada padi, jagung, kedelai dan gula;
2. Pelatihan teknis dan kewirausahaan agribisnis diarahkan untuk mendukung program diversifikasi pangan di bidang pertanian;
3. Pelatihan teknis dan kewirausahaan agribisnis diarahkan untuk mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor di bidang komoditas unggulan perkebunan;
4. Pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.

Strategi Balai Pelatihan Pertanian Jambi yaitu:

1. Pelatihan teknis dan kewirausahaan agribisnis pertanian bagi aparatur dan non aparatur di Balai Pelatihan Pertanian Jambi
   1.1 Pemantapan kelembagaan pelatihan
   1.2 Peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan pertanian
   1.3 Peningkatan dan pengembangan mutu pelatihan berbasis kompetensi kerja
   1.4 Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan
2. Pelatihan teknis dan kewirausahaan dibidang pertanian bagi pelaku utama dan pelaku usaha melalui pemberdayaan kelembagaan pelatihan swadaya

2.1. Registrasi dan legalisasi lembaga pelatihan

2.2. Standarisasi, akreditasi dan fasilitasi lembaga pelatihan

3. Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan

3.1 Fasilitasi melalui APBN

3.2 Fasilitasi melalui kerjasama

D. Program dan Kegiatan

Program Balai Pelatihan Pertanian terdiri dari:

1. Pemantapan kelembagaan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur mendukung swasembada padi, jagung, kedelai, gula, program diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas unggulan perkebunan dan kesejahteraan petani.
2. Peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan pertanian mendukung swasembada padi, jagung, kedelai, gula, program diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas unggulan perkebunan dan kesejahteraan petani.
3. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur mendukung swasembada padi, jagung, kedelai, gula, program diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas unggulan perkebunan dan kesejahteraan petani.
4. Penguatan jejaring kerjasama pelatihan bagi aparatur dan non aparatur mendukung swasembada padi, jagung, kedelai, gula, program diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas unggulan perkebunan dan kesejahteraan petani.

Kegiatan Balai Pelatihan Pertanian terdiri dari:

1. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

1.1. Pemantapan Kelembagaan Pelatihan

a. Peningkatan eselonering Balai
b. Akreditasi lembaga pelatihan swadaya
c. Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis
d. Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan
e. Pembakuan rancang bangun Balai
f. Pengembangan sistem administrasi , manajemen,
g. Pengembangan sistem informasi, Promosi dan publikasi Balai

1.2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kepelatihan Pertanian

a. Peningkatan kompetensi dan spesialisasi widyaiswara, fungsional lainnya dan tenaga teknis kepelatihan;
b. Peningkatan kualitas pejabat pengelola kepelatihan;
c. Pemenuhan kuantitas widyaiswara, fungsional lainnya dan tenaga teknis kepelatihan secara proporsional ;
d. Pengembangan kapasitas manajemen dan kepemimpinan pengelola lembaga pelatihan swadaya

1.3. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan

a. Pengembangan perencanaan program pelatihan
b. Akreditasi dan standarisasi program penyelenggaraan pelatihan
c. Sertifikasi manajemen mutu penyelenggaraan pelatihan
d. Pengembangan materi, metodologi, dan multimedia pelatihan
e. Penyelenggaraan pelatihan teknis dan kewirausahaan agribisnis mendukung swasembada padi, jagung, kedelai, gula, program diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas unggulan perkebunan dan kesejahteraan petani.
f. Penyelenggaraan pelatihan dan permagangan bagi non aparatur
g. Monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal

1.4 Pengembangan Jejaring Kerjasama Pelatihan Pertanian

a. Pengembangan kerjasama teknis pelatihan dalam negeri
b. Pengembangan kerjasama teknis pelatihan luar negeri
c. Pembentukan dan pengembangan jejaring antar lembaga kediklatan

PENDAPATAN BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

Realisasi pendapatan periode tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 55.524.860,- (*lima puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jika nilai realisasi pendapatan tahun anggaran 2011 dibandingkan dengan nilai realisasi pendapatan tahun anggaran 2010, maka realisasi pendapatan tahun anggaran 2011 mengalami peningkatan dikarenakan pendapatan dari penjualan hasil pertanian dan perkebunan lebih besar dari tahun anggaran sebelumnya.

BELANJA BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI

Realisasi belanja periode tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 13.703.507.379,- (*tiga belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 3.493.160.929,-, (*tiga milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah*) belanja barang sebesar Rp. 7.777.951.950,- (*tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) dan belanja modal sebesar Rp. 2.432.394.500,- (*dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*).

Nilai realisasi belanja periode tahun anggaran 2011 jika dibandingkan dengan periode tahun anggaran 2010 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan diawal tahun anggaran DIPA untuk tahun anggaran 2011 telah diterima oleh satker sehingga kegiatan bisa direncanakan dan dilaksanakan dengan cepat.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2011 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Balai Pelatihan Pertanian Jambi.

Balai Pelatihan Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2011 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 14.352.514.000,- (*empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah*).

Dari total anggaran di atas, rincian anggaran Satker BLU adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran	JENIS SUMBER DANA	
	APBN	BLU
2010	Rp 14,167,237,000	Rp -
2011	Rp 14,352,514,000	Rp -

Balai Pelatihan Pertanian Jambi memperoleh dana dari DIPA Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (018) dan tidak mengelola dana yang berasal dari Bagian Anggaran lain. Dana yang diperoleh berasal dari eleson I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (10) berupa Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) sebesar Rp. 9.899.925.000,- (*sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

NO	SKPA		ANGGARAN PER KEGIATAN	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL		
1	17/KU.210/J/IV/2011	26 April 2011	Rp. 461.950.000,-	TOT PUAP
2	18/KU.210/J/IV/2011	26 April 2011	Rp. 25.650.000,-	MonevTOT PUAP
3	45/KU.210/J/V/2011	18 Mei 2011	Rp. 2.060.430.000,-	Pelatihan Bagi Penyuluh Pendamping PUAP
4	46/KU.210/J/V/2011	18 Mei 2011	Rp. 4.065.380.000,-	Pelatihan Bagi PMT & Pengurus Gapoktan PUAP
5	47/KU.210/J/V/2011	18 Mei 2011	Rp. 176.510.000,-	Apresiasi & Monev PUAP
6	67/KU.210/J/VII/2011	18 Juli 2011	Rp. 307.340.000,-	Pelatihan Bagi Penyuluh Pendamping PUAP
7	68/KU.210/J/VII/2011	18 Juli 2011	Rp. 607.740.000,-	Pelatihan Bagi Pengurus Gapoktan PUAP
8	95/KU.210/J/X/2011	11 Oktober 2011	Rp. 400.730.000,-	Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh Program P2BN
9	96/KU.210/J/X/2011	11 Oktober 2011	Rp. 339.210.000,-	Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh Program P2BN
10	97/KU.210/J/X/2011	11 Oktober 2011	Rp. 100.000.000,-	Koordinasi Pelatihan Program P2BN
11	137/KU.210/J/X/2011	17 Oktober 2011	Rp. 512.620.000,-	Pelatihan Bagi Penyuluh Pendamping PUAP
12	138/KU.210/J/X/2011	17 Oktober 2011	Rp. 576.260.000,-	Pelatihan Bagi Pengurus Gapoktan PUAP
13	149/KU.210/J.2/X/2011	28 Oktober 2011	Rp. 266.105.000,-	Pelatihan Bagi Pengelola LM3

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan (LK) Tahun 2011 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Balai Pelatihan Pertanian Jambi adalah:

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi [*1*)]

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan

---

[*1*)] jika terdapat transaksi investasi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan

negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (NETO)

Realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 13.703.507.379,- (*tiga belas milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) dengan persentase 95,48 persen dari anggarannya, yang terdiri dari:

1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
   a. Penerimaan Negara Bukan Pajak

2. Realisasi Belanja Negara
   a. Belanja Rupiah Murni
   b. Belanja PNBP

No	Uraian	Anggaran		Realisasi		% Real. Angg.
1	**Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah**	**Rp**	**78,898,000**	**Rp**	**55,524,860**	**70.38%**
	-Penerimaan Pajak	Rp	78,898,000	Rp	55,524,860	**70.38%**
	- Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp	78,898,000	Rp	55,524,860	**70.38%**
2	**Realisasi Belanja Negara**	**Rp**	**14,352,514,000**	**Rp**	**13,703,507,379**	**95.48%**
	- Belanja Rupiah Murni	Rp	14,321,464,000	Rp	13,672,457,379	**95.47%**
	- Belanja PNBP	Rp	31,050,000	Rp	31,050,000	**100.00%**

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (BRUTO)

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp...

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 55.524.860,- (*lima puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) atau sebesar 70,38 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA yaitu sebesar Rp. 78.898.000,- (*tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*). Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi Pendapatan Negara dan Hibah periode Tahun Anggaran 2010, maka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah periode ini mengalami peningkatan.

Peningkatan nilai PNBP terbesar berasal dari pendapatan penjualan hasil pertanian dan perkebunan sebesar Rp. 35.969.000,- (*tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*). Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang mengalami penurunan dikarenakan kegiatan pelatihan sangat padat sehingga instansi luar tidak bisa menyewa aula dan ruang kelas.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) periode Tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

Realisasi Pendapatan per Jenis Penerimaan

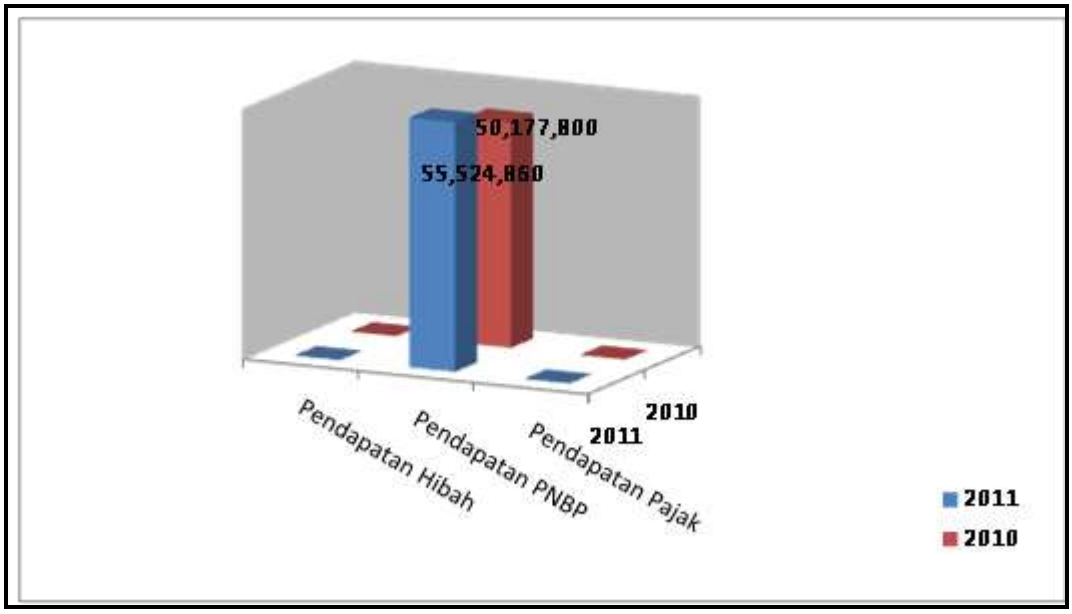

Grafik 1. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah periode tahun anggaran 2011 dan periode tahun anggaran 2010

Realisasi PNBP Rp...

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 55.524.860,- (*lima puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) atau sebesar 70,38 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2011.

Jika dibandingkan antara periode Tahun Anggaran 2011 dengan periode Tahun Anggaran 2010 realisasinya mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pagu anggaran Tahun Anggaran 2011 lebih besar.

Realisasi PNBP Lainnya Rp...

B.2.1.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya berasal dari pendapatan penjualan dan sewa, pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain. Pada periode Tahun Anggaran 2011 realisasinya sebesar Rp. 55.524.860,- (*lima puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) atau sebesar 70,38 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2011.

Jika dibandingkan antara periode Tahun Anggaran 2011 dengan periode Tahun Anggaran 2010 realisasinya mengalami peningkatan.

Realisasi PNBP lainnya dirinci dalam tabel seperti contoh di bawah ini:

Uraian	Tahun Anggaran 2011		Tahun Anggaran 2010		% Naik/Turun
Pend. Penjualan Hasil Pertanian, kehutanan dan Perkebunan	Rp	35,969,000	Rp	24,631,000	-
Pend. Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	Rp	-	Rp	-	-
Pendapatan sewa rumah dinas/ rumah negeri	Rp	1,918,400	Rp	2,128,800	-
Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang	Rp	13,473,000	Rp	17,125,000	-
Pend. Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	Rp	-	Rp	-	-
Pend. Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	Rp	4,164,460	Rp	2,160,000	-
Pend. Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian Yang Diderita oleh negara (masuk TP/TGR) Bendahara	Rp	-	Rp	3,683,000	-
Jumlah	**Rp**	**55,524,860**	**Rp**	**49,727,800**	**-**

Tabel 1. Realisasi PNBP periode tahun anggaran 2011 dan periode tahun anggaran 2010

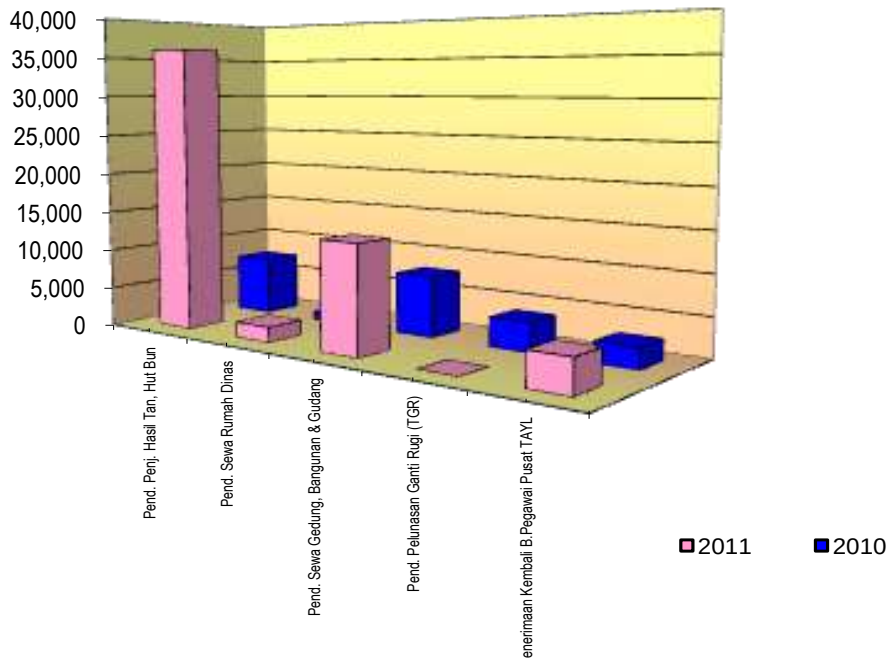

Grafik 2. Komposisi Realisasi Penerimaan PNBP periode tahun anggaran 2011 dan periode tahun anggaran 2010

B.2.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara Rp...

Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 13.711.015.499,- (*tiga belas milyar tujuh ratus sebelas juta lima belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) atau 95,53 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja Negara TA 2011. Realisasi Belanja Negara dibandingkan antara periode tahun anggaran 2011 dengan periode tahun anggaran 2010 mengalami peningkatan.

Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini:

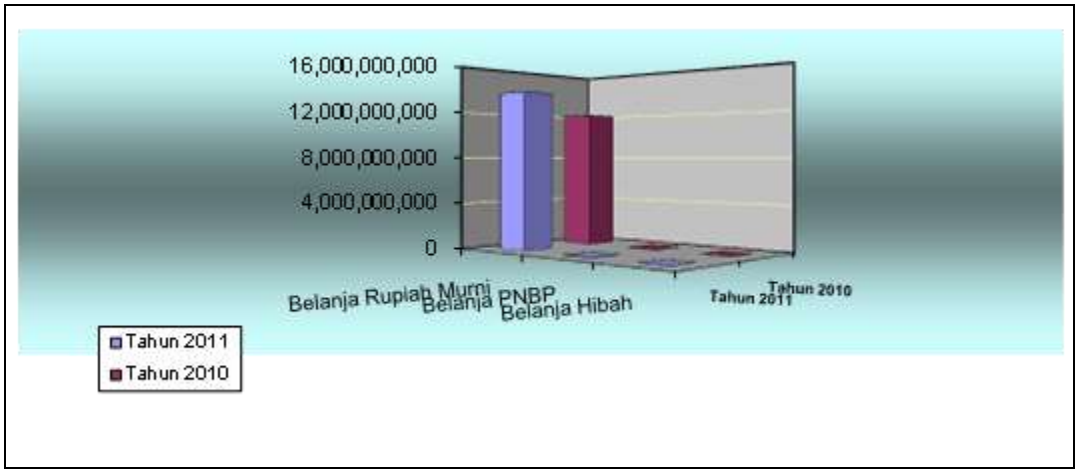

Grafik 3. Komposisi Alokasi Belanja Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010

B.2.2.1. Belanja

Realisasi Belanja Rp...

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 13.711.015.499,- (*tiga belas milyar tujuh ratus sebelas juta lima belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) atau 95,53 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:

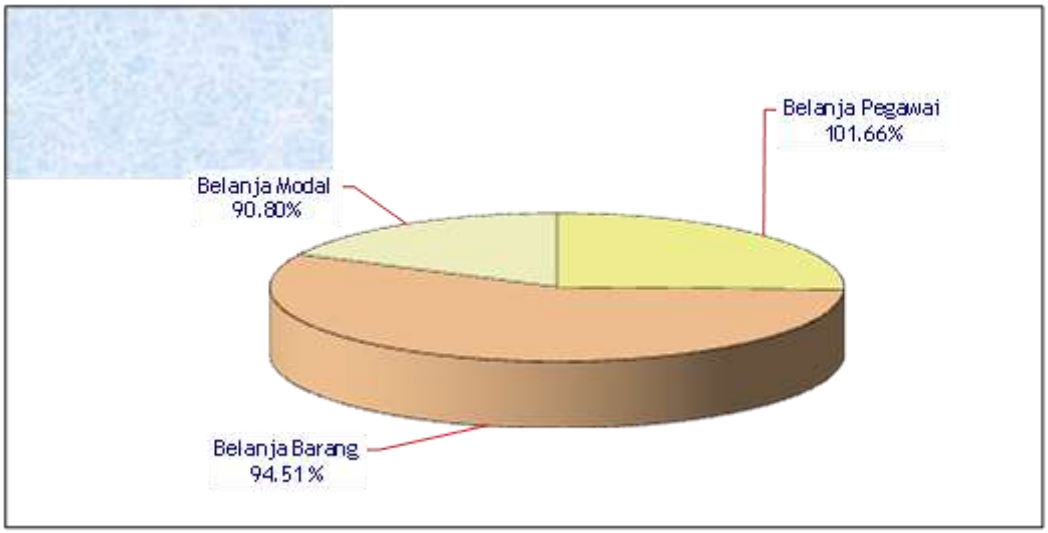

Grafik 4. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2011

B.2.2.1.1.Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp...

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 3.500.669.049,- (*tiga milyar lima ratus juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah*) atau 101,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA untuk Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011. Realisasi Belanja Pegawai jika dibandingkan antara periode tahun anggaran 2011 dengan periode tahun anggaran 2010 mengalami peningkatan. Peningkatan nilai realisasi belanja ini dikarenakan adanya penambahan 1 pegawai yang berasal dari test cpns tahun 2010, adanya kenaikan gaji berkala untuk 13 pegawai dan 1 pegawai yang naik pangkat/golongan sehingga realisasi belanja pegawai melebihi 100 persen.

Pada belanja pegawai terdapat pengembalian belanja sebesar Rp. 7.508.120,- (*tujuh juta lima ratus delapan ribu seratus dua puluh rupiah*) yang terdiri dari pengembalian tunjangan fungsional PNS, pengembalian uang makan PNS dan pengembalian tunjangan umum PNS sehingga total belanja pegawai neto sebesar Rp. 3.493.160.929,- (*tiga milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah*).

Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2011		Tahun Anggaran 2010		% Naik/(Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp	3,500,669,049	Rp	2,931,334,125	0.16 %
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	Rp	-	Rp	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	Rp	-	Rp	-	-
Belanja Pegawai Perjan	Rp	-	Rp	-	-
Belanja Gaji Dokter PTT	Rp	-	Rp	-	-
Belanja Honorarium	Rp	-	Rp	-	-
Belanja Lembur	Rp	-	Rp	111,805,000	(100 %)
Belanja Vakasi	Rp	-	Rp	-	-
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	Rp	-	Rp	136,280,000	(100 %)
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	Rp	-	Rp	-	-
Belanja Asuransi Kesehatan	Rp	-	Rp	-	-
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	Rp	-	Rp	-	-
Total	**Rp**	**3,500,669,049**	**Rp**	**3,179,419,125**	**0.09 %**

Tabel 2. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011
dan Tahun Anggaran 2010

B.2.2.1.2.Belanja Barang

Belanja Barang Rp...

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 7.777.951.950,- (*tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) atau 94,51 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA untuk Belanja Barang Tahun Anggaran 2011. Realisasi belanja barang jika dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun anggaran yang lalu mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan di tahun anggaran 2010 dana SKPA menambah nilai DIPA dan ditahun anggaran 2011 dana SKPA tidak menambah nilai DIPA dikarenakan SKPA tetap menggunakan kode satker pemberi SKPA (412069).

Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2011		Tahun Anggaran 2010		% Naik/(Turun)
Belanja Barang Operasional	Rp	573,873,000	Rp	619,335,000	(0.08 %)
Belanja Barang Non Operasional	Rp	3,638,164,700	Rp	2,917,073,500	0.20 %
Belanja Jasa	Rp	262,296,050	Rp	1,366,873,625	(4.21 %)
Belanja Pemeliharaan	Rp	321,370,500	Rp	351,730,500	(0.09 %)
Belanja Perjalanan	Rp	2,982,247,700	Rp	3,420,002,800	(0.15 %)
Jumlah	**Rp**	**7,777,951,950**	**Rp**	**8,675,015,425**	**(0.11 %)**

Tabel 3. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 dan
Tahun Anggaran 2010

B.2.2.1.3.Belanja Modal

Belanja Modal Rp...

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.432.394.500,- (*dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*) atau 90,80 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA untuk Belanja Modal Tahun Anggaran 2011. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran yang lalu realisasi belanja modal mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan DIPA telah diterima satker diawal tahun sehingga belanja modal bisa direncanakan dan dilaksanakan dengan cepat. Selain itu di tahun anggaran 2010 anggaran untuk belanja modal hanya Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), sedangkan di 2011 anggaran belanja modal sebesar Rp. 2.678.973.000,- (*dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2011		Tahun Anggaran 2010		% Naik/(Turun)
Belanja Modal Tanah	Rp	-	Rp	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	1,569,899,000	Rp	98,875,000	0.94 %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	644,142,300	Rp	-	100 %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	179,353,200	Rp	-	100 %
Belanja Modal Fisik Lainnya	Rp	39,000,000	Rp	-	100 %
Jumlah	**Rp**	**2,432,394,500**	**Rp**	**98,875,000**	**0.96 %**

Tabel 4. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010

Catatan Penting Lainnya

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Balai Pelatihan Pertanian Jambi pada tahun anggaran 2011 telah melakukan revisi DIPA sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Surat revisi pertama nomor: SP-517/WPB.06/BG.0103/2011 pada Tgl. 26 Agustus 2011. Revisi ini merupakan revisi belanja modal antar output sehingga nilai pagu belanja modal tidak berubah. Selain itu, pada revisi ini terjadi pengurangan pagu DIPA untuk belanja pegawai (transito) sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) yang diminta kembali oleh Eselon I BPPSDMP.

2. Surat revisi kedua nomor: S-1623/WPB.06/BD.0204/2011 Tgl. 25 Oktober 2011. Revisi kedua ini merubah belanja bahan menjadi belanja modal, sehingga pagu DIPA belanja bahan berkurang sebesar Rp. 924.122.000,- (*sembilan ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah*) dan menambah pagu belanja modal sebesar Rp. 924.122.000,- (*sembilan ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah*).

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Posisi Neraca secara umum Tahun Anggaran 2011 untuk Aset sebesar Rp. 9.023.169.840,- (*sembilan milyar dua puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*), Kewajiban sebesar Rp. 9.917.066,- (*sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam puluh enam rupiah*) dan Ekuitas Dana Rp. 9.013.252.774,- (*sembilan milyar tiga belas juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*).

Komposisi Neraca Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2011		Tahun Anggaran 2010		% Naik/ (Turun)
Aset	Rp	9,023,169,840	Rp	6,541,764,190	37.93 %
Kewajiban	Rp	9,917,066	Rp	19,019,000	(47.85 %)
Ekuitas Dana	Rp	9,013,252,774	Rp	6,522,745,190	38.18 %

Tabel 5. Komposisi Neraca Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010

Jumlah Aset Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 9.023.169.840,- (*sembilan milyar dua puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 82.335.150,- (*delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*) dan Aset Tetap sebesar Rp. 8.940.834.690,- (*delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*).

Jumlah Kewajiban Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 9.917.066,- (*sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam puluh enam rupiah*) yang merupakan kewajiban jangka pendek.

Jumlah ekuitas dana Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 9.013.252.774,- (*sembilan milyar tiga belas juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah*) terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 72.418.084,- (*tujuh puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu delapan puluh empat rupiah*) dan ekuitas dana investasi sebesar Rp. 8.940.834.690,- (*delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*).

Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti contoh dibawah ini

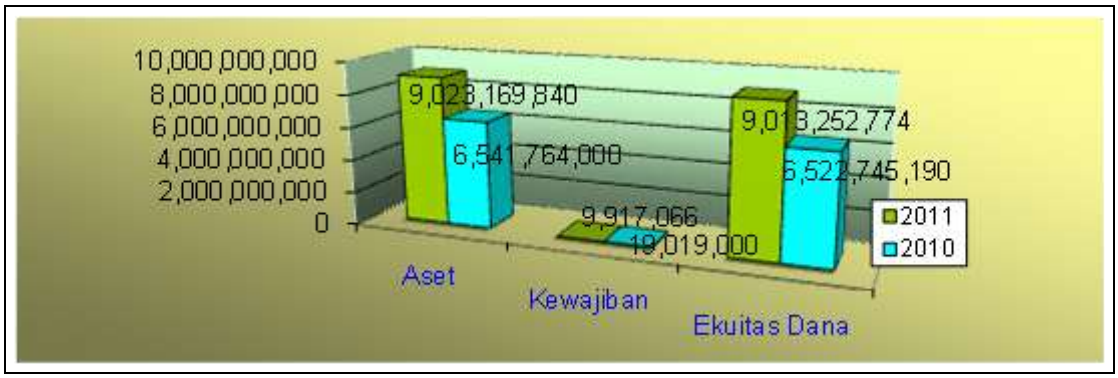

Grafik5. Komposisi Neraca Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. ASET

C.2.1.1. Aset Lancar

Nilai aset lancar balai pelatihan pertanian jambi tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 82.335.150,- (*delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*) yang merupakan nilai persediaan.

C.2.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011sebesar Rp. 0,- (*NIHIL*).

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011adalah sbb:

Tahun Anggaran 2011	Tahun Anggaran 2010	Kenaikan/(Penurunan)
Rp -	Rp. 0,-	-

C.2.1.1.2 Persediaan

Nilai persediaan balai pelatihan pertanian jambi tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 82.335.150,- (*delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*). Jika dibandingkan dengan nilai persediaan tahun anggaran 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp. 49.011.150,- (*empat puluh sembilan juta sebelas ribu seratus lima puluh rupiah*).

Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik, sesuai dengan Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan nomor: 1578/BPP/J3.9/12/2011 Tanggal 31 Desember 2011.

Peningkatan niilai persediaan tahun anggaran 2011adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2011	Tahun Anggaran 2010	Kenaikan/(Penurunan)
Rp. 82.335.150,-	Rp. 33.324.000,-	Rp. 49.011.150,-

Daftar Persediaan Tahun Anggaran 2011

Kode Akun	Uraian Akun	Jumlah
115111	Barang Konsumsi	Rp. 9.890.500,-
115113	Bahan Untuk Pemeliharaan	Rp. 10.000,-
115123	Hewan Dan Tanaman Untuk Dijual	Rp. 0,-
115131	Bahan Baku	Rp. 72.434.650,-
TOTAL		**Rp. 82.335.150,-**

C.2.1.2. Aset Tetap

Nilai aset tetap balai pelatihan pertanian jambi tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 8.940.834.690,- (*delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*) yang terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2010 terjadi peningkatan jumlah aset tetap sebesar Rp. 2.432.394.500,- (*dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*) yang berasal dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2011	Tahun Anggaran 2010	% Naik / (Turun)
1	Peralatan dan Mesin	Rp 3,811,465,140	Rp 2,217,566,140	71.87 %
2	Gedung dan Bangunan	Rp 4,559,435,350	Rp 3,915,293,050	16.45 %
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 512,934,200	Rp 333,581,000	53.76%
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 57,000,000	Rp 42,000,000	35.71 %
	Jumlah	**Rp 8,940,834,690**	**Rp 6,508,440,190**	**37.37 %**

Tabel 6. Posisi Aset Tetap Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010

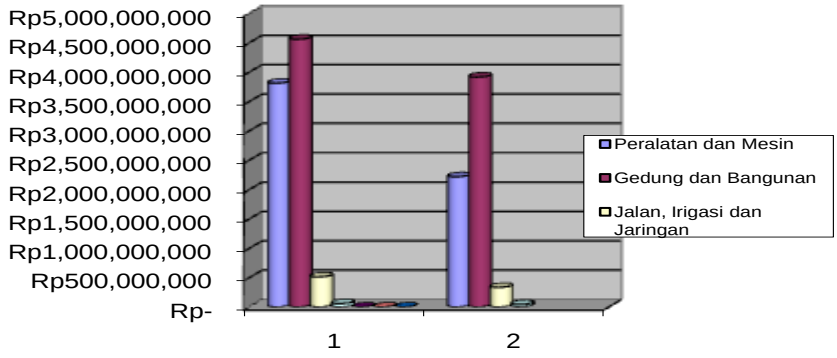

Grafik 6. Posisi Aset Tetap Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010

Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Aset Tetap dalam Neraca	Aset Tetap dalam SIMAK BMN	Selisih
1	Peralatan dan Mesin	Rp 3,811,465,140	Rp 3,811,465,140	Rp -
2	Gedung dan Bangunan	Rp 4,559,435,350	Rp 4,559,435,350	Rp -
3	Jalan dan Jembatan	Rp 179,353,200	Rp 179,353,200	Rp -
4	Irigasi	Rp 192,574,000	Rp 192,574,000	Rp -
5	Jaringan	Rp 141,007,000	Rp 141,007,000	Rp -
6	Aset Tetap Lainnya	Rp 57,000,000	Rp 57,000,000	Rp -
	Jumlah	**Rp 8,940,834,690**	**Rp 8,940,834,690**	**Rp -**

C.2.1.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 3.811.465.140,- (*tiga milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah*). Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2010 nilai peralatan dan mesin mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.593.899.000,- (*satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).

Tahun Anggaran 2011	Tahun Anggaran 2010	Kenaikan / (penurunan)
Rp. 3.811.465.140,-	Rp. 2.217.566.140,-	Rp. 1.593.899.000,-

Tabel 7. Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.593.899.000,- (*satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) tersebut adalah sbb:

Penambahan :		
Saldo Awal	Rp	-
Pembelian dari Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	1,569,899,000
Pembelian dari belanja Modal Fisik Lainnya	Rp	24,000,000
Transfer Masuk	Rp	-
Pengembangan	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
	Rp	**1,593,899,000**
Pengurangan		
Transfer Keluar	Rp	-
Reklasifikasi Keluar	Rp	-
Koreksi Nilai	Rp	-
	Rp	**-**

Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

MA	Uraian	Jumlah	
532111	BM Peralatan dan Mesin	Rp	1,569,899,000
536111	BM Fisik Lainnya	Rp	24,000,000
	Jumlah Belanja	Rp	1,593,899,000

Penambahan neraca peralatan dan mesin tidak sama dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin, hal ini disebabkan karena setelah penggabungan dengan aplikasi SIMAK BMN terdapat penambahan aset peralatan dan mesin pada neraca SAKPA yang berasal dari belanja modal fisik lainnya berupa pengadaan gorden sebesar Rp. 24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*).

C.2.1.2.2. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 4.559.435.350,- (*empat milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*). Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2010 nilai gedung dan bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp. 644.142.300,- (*enam ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah*). Nilai tersebut merupakan nilai belanja modal gedung dan bangunan dengan akun 533111.

Tahun Anggaran 2011	Tahun Anggaran 2010	Kenaikan / (penurunan)
Rp. 4.559.435.350,-	Rp. 3.915.293.050,-	Rp. 644.142.300,-

Tabel 8. Posisi Perbandingan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010

C.2.1.2.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 512.934.200,- (*lima ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah*). Nilai tersebut terdiri dari: nilai jalan dan jembatan sebesar Rp. 179.353.200,- (*seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah*), nilai irigasi sebesar Rp. 192.574.000,- (*seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) dan nilai jaringan sebesar Rp. 141.007.000,- (*seratus empat puluh satu juta tujuh ribu rupiah*). Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2010 nilai jalan, irigasi dan jaringan mengalami peningkatan sebesar Rp. 179.353.200,- (*seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah*) yang merupakan nilai belanja modal jalan dan jembatan dengan akun 534111 .

Tahun Anggaran 2011	Tahun Anggaran 2010	Kenaikan / (penurunan)
Rp. 512.934.200,-	Rp. 333.581.000,-	Rp. 179.353.200,-

Tabel 9. Posisi Perbandingan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010

C.2.1.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap lainnya tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 57.000.000,- (*lima puluh tujuh juta rupiah*). Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2010 nilai aset mengalami peningkatan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) berupa pembelian buku perpustakaan. Penambahan aset tetap lainnya pada neraca tidak sama dengan realisasi belanja modal fisik lainnya dan tidak menambah nilai aset tetap lainnya, hal ini disebabkan karena setelah penggabungan dengan aplikasi SIMAK BMN nilai belanja modal fisik lainnya yang berupa pengadaan gorden masuk ke aset tetap berupa peralatan dan mesin sebesar Rp. 24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*).

Tahun Anggaran 2011	Tahun Anggaran 2010	Kenaikan / (penurunan)
Rp. 57.000.000,-	Rp. 42.000.000,-	Rp. 15.000.000,-

Tabel 10. Posisi Perbandingan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010

C.2.2. KEWAJIBAN

C.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

C.2.2.1.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 9.917.066,- (*sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam puluh enam rupiah*). Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2010 nilai utang kepada pihak ketiga mengalami penurunan sebesar Rp. 9.101.934,- (*sembilan juta seratus satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*).

Tahun Anggaran 2011	Tahun Anggaran 2010	Kenaikan / (penurunan)
Rp. 9.917.066,-	Rp. 19.019.000,-	(Rp. 9.101.934,-)

Tabel 11. Posisi Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010

C.2.3. EKUITAS DANA

C.2.3.1. Ekuitas Dana Lancar

C.2.3.1.1 Cadangan Persediaan

Nilai cadangan persediaan balai pelatihan pertanian jambi tahun anggaran 2011 sebesar sebesar Rp. 82.335.150,- (*delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah*). Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2010 nilai cadangan persediaan mengalami penurunan sebesar Rp. 49.011.150,- (*empat puluh sembilan juta sebelas ribu seratus lima puluh rupiah*).

Tahun Anggaran 2011	Tahun Anggaran 2010	Kenaikan / (penurunan)
Rp. 82.335.150,-	Rp. 33.324.000,-	Rp. 49.011.150,-

Tabel 12. Posisi Perbandingan Cadangan Persediaan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010

C.2.3.1.2 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang

Nilai dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 9.917.066,- (*sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam puluh enam rupiah*). Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2010 nilai dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang mengalami penurunan sebesar Rp. 9.101.934,- (*sembilan juta seratus satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*).

Tahun Anggaran 2011	Tahun Anggaran 2010	Kenaikan / (penurunan)
Rp. 9.917.066,-	Rp. 19.019.000,-	(Rp. 9.101.934,-)

Tabel 13. Posisi Perbandingan Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010

C.2.3.2. Ekuitas Dana Investasi

C.2.3.2.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai yang diinvestasikan dalam aset tetap pada balai pelatihan pertanian jambi tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 8.940.834.690,- (*delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*). Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2010 nilai yang diinvestasikan dalam aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.432.394.500,- (*dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*).

Tahun Anggaran 2011	Tahun Anggaran 2010	Kenaikan / (penurunan)
Rp. 8.940.834.690,-	Rp. 6.508.440.190,-	Rp. 2.432.394.500,-

Tabel 14. Posisi Perbandingan Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010

C.3 CATATAN PENTING LAINNYA

Terdapat kesalahan akun dari belanja modal fisik lainnya (536111) menjadi belanja peralatan dan mesin (532111) sebesar Rp. 24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*) berupa pengadaan gorden sehingga menambah nilai aset peralatan dan mesin.

D. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

D.1. REKENING PEMERINTAH

Balai Pelatihan Pertanian Jambi memiliki rekening di Bank BNI Cabang Jambi, Atas Nama: Bendahara Pengeluaran Balai Pelatihan Pertanian Jambi Nomor Rekening: 0069886486 dan Jenis Rekening Giro. Rekening tersebut merupakan rekening lanjutan dari tahun anggaran yang lalu sesuai surat persetujuan penggunaan rekening lanjutan dari KPPN Jambi nomor: S.1000/WPB.06/KP.0140/2011 Tgl. 14 April 2011.

D.2. INFORMASI BELANJA SECARA AKRUAL

Transaksi akrual yang ada di BPP Jambi berasal dari belanja yang masih harus dibayar (disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca). Belanja tersebut merupakan belanja pegawai dan belanja langganan daya dan jasa.

1. Pembayaran kekurangan gaji (kenaikan pangkat) 1 (satu) pegawai atas nama Rasim sebesar Rp. 367.166,- (*tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah*).
2. Pembayaran langganan listrik bulan desember 2011 sebesar Rp. 6.283.950,- (*enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
3. Pembayaran langganan telfon bulan desember 2011 sebesar Rp. 3.265.950,- (*tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

D.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Balai Pelatihan Pertanian Jambi dengan kode satker 394771 memperoleh dana yang berasal dari eleson I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian berupa Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) sebanyak 13 (tiga belas) SKPA dengan dana keseluruhan sebesar Rp. 9.899.925.000,-

(*sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*). Realisasi dana SKPA tersebut sebesar Rp. 8.475.248.450,- (*delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah*) atau sebesar 85,61 persen dari anggaran keseluruhan SKPA. SKPA tersebut terdiri atas kegiatan program PUAP, program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dan kegiatan LM3. Realisasi setiap SKPA dapat dilihat pada table berikut:

NO	NOMOR DAN TANGGAL SKPA	ANGGARAN PER KEGIATAN	REALISASI PER KEGIATAN	KETERANGAN
1	17/KU.210/J/IV/2011, 26 April 2011	Rp. 461.950.000,-	Rp . 382.093.300,-	TOT PUAP
2	18/KU.210/J/IV/2011, 26 April 2011	Rp. 25.650.000,-	Rp. 20.640.000,-	MonevTOT PUAP
3	45/KU.210/J/V/2011, 18 Mei 2011	Rp. 2.060.430.000,-	Rp. 1.751.685.650,-	Pelatihan Bagi Penyuluh Pendamping PUAP
4	46/KU.210/J/V/2011, 18 Mei 2011	Rp. 4.065.380.000,-	Rp. 3.478.275.600,-	Pelatihan Bagi PMT & Pengurus Gapoktan PUAP
5	47/KU.210/J/V/2011, 18 Mei 2011	Rp. 176.510.000,-	Rp. 164.499.800,-	Apresiasi & Monev PUAP
6	67/KU.210/J/VII/2011, 18 Juli 2011	Rp. 307.340.000,-	Rp. 250.982.700,-	Pelatihan Bagi Penyuluh Pendamping PUAP
7	68/KU.210/J/VII/2011, 18 Juli 2011	Rp. 607.740.000,-	Rp. 550.311.700-	Pelatihan Bagi Pengurus Gapoktan PUAP
8	95/KU.210/J/X/2011, 11 Oktober 2011	Rp. 400.730.000,-	Rp. 315.892.900,-	Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh Program P2BN
9	96/KU.210/J/X/2011, 11 Oktober 2011	Rp. 339.210.000,-	Rp. 293.185.400,-	Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh Program P2BN
10	97/KU.210/J/X/2011, 11 Oktober 2011	Rp. 100.000.000,-	Rp. 99.924.000,-	Koordinasi Pelatihan Program P2BN
11	137/KU.210/J/X/2011, 17 Oktober 2011	Rp. 512.620.000,-	Rp. 447.297.700,-	Pelatihan Bagi Penyuluh Pendamping PUAP
12	138/KU.210/J/X/2011, 17 Oktober 2011	Rp. 576.260.000,-	Rp. 512.663.700,-	Pelatihan Bagi Pengurus Gapoktan PUAP
13	149/KU.210/J.2/X/2011 28 Oktober 2011	Rp. 266.105.000,-	Rp. 207.797.650,-	Pelatihan Bagi Pengelola LM3